

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Persoalan-Persoalan Praktik Komunikasi Krisis di Awal Pandemi**

##### **Covid-19 Tahun 2020**

Pada bab sebelumnya peneliti menganalisis komunikasi krisis pandemi covid-19 di Kota Semarang selama Tahun 2020 berdasar dari narasumber sekunder dan tersier yang memiliki pengaruh dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Penyesuaian masyarakat yang diamati oleh narasumber di bab sebelumnya masuk ke dalam fase-fase komunikasi krisis dari pihak pemerintah dan non pemerintah sebagai perwakilan masyarakat. Fase pra krisis, fase awal krisis, fase krisis, hingga fase resolusi dan evaluasi, merupakan tahapan yang selayaknya berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga pada bab empat ini, peneliti menganalisis hasil dari penemuan sebelumnya yang bersumber dari data sekunder dan tersier terhadap data utama dari narasumber primer. Data primer yang dimaksud bersumber dari hasil wawancara terhadap Walikota Semarang selaku penentu kebijakan tertinggi di Kota Semarang dan Sekretaris Daerah selaku pemegang jabatan teknis dan fungsionaris tertinggi yang bersifat administratif di Kota Semarang. Berdasar hasil penggabungan ketiga data, telah ditemukan ciri-ciri dari praktik buruk komunikasi krisis Pemerintah Kota Semarang selama pandemi covid-19 Tahun 2020 berdasar dari persoalan-persoalan di dalamnya, sebagai berikut: 1) Keterlambatan dalam pembuatan

kebijakan dan penentuan kebijakan; 2) Tidak proaktif dalam penyampaian informasi; dan 3) Sikap Inkonsistensi Implementasi Kebijakan.

#### **4.1.1 Realisasi dalam Pembuatan dan Penentuan Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Iswar Aminuddin selaku Sekretaris Daerah Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan perumusan kebijakan sejak instruksi pemerintah pusat mengenai pandemi covid-19 pada awal Maret 2020. Kebijakan yang diambil merupakan hasil diskusi dengan tenaga ahli, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi.<sup>88</sup> Instruksi kebijakan bersifat vertikal mengalami masa penggondokan hingga diturunkan ke struktur satuan kerja pemerintahan di bawahnya. Proses yang penurunan kebijakan yang lama di awal pembentukan ini juga di benarkan melalui pernyataan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang Bambang Pramusinto, perwakilan masyarakat Direktur LSM Pattiro Semarang Widi Nugroho yang menyatakan dalam wawancaranya dengan peneliti mengenai himbuan penyebaran covid-19 bersifat umum dan dangkal. Tahap komunikasi krisis terganggu di awal masuknya virus covid-19 di Kota Semarang pada Tahun 2020, sebab kebijakan yang belum terbangun secara kokoh. Perwal Nomor 28 Tahun 2020 mengenai kebijakan PPKM (Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kota Semarang diresmikan untuk pertama kalinya pada tanggal 24 April 2020. Sementara itu kasus pasien positif pertama covid-19 di Kota Semarang telah ditemukan sejak tanggal 17 Maret 2020 di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Hal ini merupakan bentuk dari keterlambatan pemerintahan

---

<sup>88</sup> Wawancara Iswar Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Semarang, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Semarang Gedung Balaikota Semarang Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, 28 Desember 2021.

dalam penurunan kebijakan. Sehingga pada fase pra krisis pandemi covid-19 Pemerintah Kota Semarang dinyatakan belum berhasil dalam memberikan tahap komunikasi krisis yang ideal menurut Reynolds dan Seeger (2005).

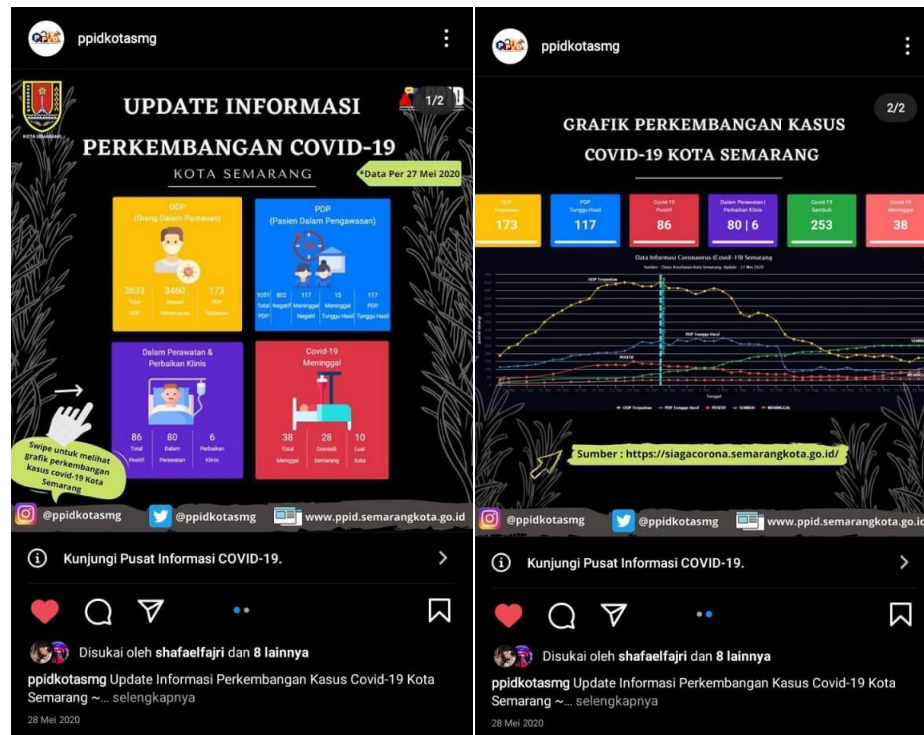
Selain itu keterlambatan dalam penurunan kebijakan juga berdampak pada pembuatan web informasi seputar covid-19 yakni [siagacorona.semarangkota.go.id](http://siagacorona.semarangkota.go.id). Web integrasi seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang) yang digunakan oleh peneliti untuk tracking data seputar perjalanan covid-19 di Kota Semarang mulai dirancang pada tanggal 8 Maret 2020. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang dalam wawancaranya:

“...tanggal 2 kemudian kita rapat, *web* Siaga Corona itu kita rancang sekitar tanggal— tanggal tanggal 8, 8 Maret lah. 8 Maret, jadi kita membuat Siaga Corona itu dalam waktu 2 hari, kalau nggak salah. Dua hari kita rapat dengan OPD-OPD terkait, kita buat komitmen, udah kita integrasikan,”<sup>89</sup>

Sementara kasus positif pertama di Indonesia telah diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Berdasarkan data dari sumber pusat informasi Kota Semarang melalui kanal media sosial Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), web [siagacorona.semarangkota.go.id](http://siagacorona.semarangkota.go.id) dapat digunakan dan lengkap dengan informasi yang telah terintegrasi seputar covid-19 pada tanggal 28 Mei 2020.

---

<sup>89</sup> Wawancara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang Bambang Pramusinto, di Kantor Diskominfo Kota Semarang Jl. Pemuda No. 148 Sekayu Semarang Tengah, 17 Juni 2021.



Gambar 4. 1 Update Informasi Perkembangan Covid-19

Sumber: Instagram @ppidkotasmg

Akses secara umum dan informasi lengkap mengenai covid-19 resmi dapat digunakan jauh setelah kasus positif pertama diumumkan di Kota Semarang yakni tanggal 17 Maret 2020. Selain tidak ideal, maka komunikasi krisis di Kota Semarang selama pandemi covid-19 Tahun 2020 dinyatakan buruk dengan penyampaian informasi secara digital (online) kepada masyarakat terlambat. Kebutuhan masyarakat mengenai *update* data informasi secara aktual disampaikan secara online di tengah penyebaran virus covid-19 yang terus berjalan fluktuatif, sehingga kanal kanal secara digital seharusnya mampu disediakan secara cepat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4.1.2 Sikap Masyarakat Terhadap Penyampaian Informasi**

Pengetahuan masyarakat yang dibuat dangkal akan virus covid-19 ini juga menimpa pada awal masa penanganan oleh tenaga kesehatan di Kota Semarang. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, dr. Susi Herawati memperoleh instruksi langsung dari Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan di Kota Semarang selain RSUP Dr. Kariadi Semarang. Keterbatasan pengetahuan masyarakat juga merupakan keterbatasan pengetahuan tenaga kesehatan saat fase pra krisis terjadi, sebab pelayanan yang disediakan terbatas dan alat kesehatan yang tersedia bersifat sederhana yakni pengujian menggunakan rapid test. Validitas dalam menentukan jumlah pasien positif covid-19 tidak dapat terjangkau seluruhnya, juga dengan keterbatasan pasokan alat uji kesehatan.

Sementara itu himbauan dari pemerintah untuk masyarakat untuk pertama kalinya saat fase krisis terjadi yakni dengan menggunakan istilah 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan dengan sabun/handsanitizer, dan Menjaga Jarak) merupakan suatu pembiasaan baru. Ketersediaan akan sabun cuci tangan atau handsanitizer saat itu menjadi langka di pasaran, sehingga terpaksa masyarakat di Kota Semarang terbagi menjadi dua sisi, yakni masyarakat yang paham akan bahaya virus covid-19 dan masyarakat yang tidak paham dan cenderung menyepelekan bahaya virus covid-19. Hal ini mengakibatkan istilah 3M tidak memiliki pengaruh yang besar dan cenderung tidak mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang saat fase awal krisis. Iswar menganalisis fase awal krisis dengan menggunakan 3M ini tidak memiliki pengaruh besar terhadap laju perekonomian di Kota Semarang. Sehingga berdasarkan dari hasil

penelitian dari narasumber utama faktor kesehatan dan ekonomi di Kota Semarang menjadi perhatian khusus para pemangku kebijakan.

Sehingga pada Bulan Juli-Agustus Tahun 2020 di Kota Semarang masuk ke dalam tahap krisis (*initial event*), dimana laju pertumbuhan masyarakat positif covid-19 naik secara signifikan terutama pasca lebaran Tahun 2020. Pemerintah Kota Semarang memberlakukan kebijakan PPKM darurat. Seluruh komponen masyarakat diminta untuk memberhentikan dan membatasi kegiatan perekonomiannya. Hal ini ditegaskan dan dinyatakan oleh Hendrar Prihadi dalam wawancaranya secara virtual, sebagai berikut:

“Kendalanya masyarakat nggak ngerti kalau sekarang ini PPKM darurat. Maka dari itu, kita setiap hari “berantem”. Ada yang jam 20.00 seharusnya pedagang kaki lima/ pengusaha/nongkrong itu sudah tutup tapi masih buka.”<sup>90</sup>

Hendrar Prihadi melakukan langkah tegas untuk menutup seluruh akses ekonomi yang masih berjalan di atas jam delapan malam. Hal ini dilakukan untuk menekan angka positif covid-19 di Kota Semarang. Agus Joko Triyono dalam wawancaranya dengan peneliti menyatakan bahwa kebijakan di Kota Semarang menggunakan sistem buka tutup kebijakan, artinya jika kasus positif covid-19 naik maka kebijakan akan diperketat, apabila kasus positif covid-19 turun maka kebijakan akan diperlonggar kembali. Sistem pengetatan dan pelonggaran kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang ini melihat dari kondisi laju perekonomian, sebab ingin menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi.

---

<sup>90</sup> Wawancara Hendrar Prihadi, Walikota Semarang, virtual zoom, 12 Juli 2021.

Fase resolusi dan evaluasi yang terjadi saat pandemi covid-19 di Kota Semarang masuk ke dalam kebijakan pembiasaan kehidupan baru dengan istilah (*new normal*). Kebijakan PPKM masih menjadi peraturan yang diberlakukan, sebab sistem pengetatan dan pelanggaran di dalamnya berbeda dengan sistem pilihan kebijakan lockdown:

“Ekonomi di sisi masyarakat sangat berpengaruh besar, pendapatan asli daerah (PAD) pun juga terkoreksi walaupun tidak terlalu signifikan di awal-awal pandemi covid-19..... bahwa sistem lockdown itu tidak cukup mampu menjadi bahan tolak ukur laju pertumbuhan covid-19 itu sendiri.”<sup>91</sup>

Iswar menyatakan bahwa pilihan lockdown tidak akan mampu menyeimbangkan jumlah PAD yang masuk nantinya selama pandemi-covid-19 di Kota Semarang. Komunikasi Krisis yang diterapkan saat fase resolusi dan evaluasi tetap menggunakan sistem buka-tutup kebijakan melalui PPKM. Iswar juga menyatakan alasan dari keputusan buka-tutup kebijakan dikarenakan, Pemerintah Kota Semarang masih dinyatakan aman dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat.

Kebencanaan non alam yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang merupakan isu internasional yang tidak dapat terprediksi secara tepat laju perkembangannya. Sehingga Iswar menambahkan melalui pernyataannya melalui kebijakan mikrozonasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui pengelompokan jenis-jenis masyarakat menurut peta sebaran daerah yang terpapar covid-19 selama Tahun 2020 sebagai tolak ukur penguatan kebijakan PPKM di tahun-tahun berikutnya. Sebab Iswar menyatakan Pemerintah

---

<sup>91</sup> Wawancara Iswar Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Semarang, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Semarang Gedung Balaikota Semarang Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, 28 Desember 2021.

Kota Semarang masih menerapkan kebijakan PPKM dengan tetap memperhitungkan skala ekonomi di balik dampak kesehatan yang akan terjadi nantinya:

“Kebijakan PPKM diambil karena masyarakat butuh makan, sementara pemerintah butuh pendapatan dan kesehatan. Sehingga ketika laju covid-19 tinggi, maka kita mencoba untuk membatasi saja kegiatan masyarakat sambil kita amati statistik dari update data dan terbitlah perwal setelah itu. Akhirnya sistem mikrozonasi ini kita lakukan, dengan cara tidak menutup/membatasi kegiatan masyarakat di seluruh wilayah di Kota Semarang, sebab masih ada kelurahan yang tingkat terpaparnya itu kecil. Sehingga hanya beberapa wilayah saja yang ditutup atau dibatasi.”<sup>92</sup>

Sehingga dengan menganalisis hasil wawancara narasumber utama pada bab empat ini ditambahkan dengan narasumber sekunder dan tersier pada bab tiga, dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki in-konsistensi kebijakan pada penerapan PPKM dengan sistem pengetatan dan pelanggaran serta memegang kendali komunikasi krisis melalui media dengan menggunakan pendekatan secara ekonomi pada media massa lokal. Implementasi dan penurunan kebijakan diselenggarakan dengan persetujuan pemerintah pusat dan provinsi yang secara politis memiliki latar belakang ke partaian yang sama, namun menggunakan gaya komunikasi krisis pimpinan pemerintahan yang berbeda untuk saling mengisi.

#### **4.1.3 Koordinasi Informasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang**

Implementasi kebijakan dalam rangka upaya pengurangan penyebaran virus covid-19 di Kota Semarang terlambat jika dilihat dari kasus pertama tanggal 15

---

<sup>92</sup> Wawancara Iswar Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Semarang, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Semarang Gedung Balaikota Semarang Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, 28 Desember 2021.



Maret 2020, merupakan hasil koordinasi dari pusat yang terlambat pula. Proses penelaahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap isu kebencanaan covid-19 baru dilaksanakan setelah ditetapkan covid-19 sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020. Penetapan kasus kebencanaan pada tingkat pusat membuat putusan kebijakan di Kota Semarang mengenai covid-19 dan upaya pencegahannya belum berjalan maksimal sejak awal. Selain itu penetapan satuan gugus tugas sebagai sumber informasi selama pandemi covid-19 berlaku setelah adanya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019. Menurut peraturan yang telah berlaku, maka Pemerintah Kota Semarang mengacu pada peraturan pusat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai koordinasi dari pusat ke daerah. Artinya semua kebijakan yang akan dilaksanakan di daerah terkait covid-19 merupakan turunan dari pusat serta telah disetujui.

Berkaitan dengan pengetatan dan pelonggaran kebijakan PPKM yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kota Semarang, disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2020. Justru Kebijakan PPKM terlebih dahulu dibuat dan diselenggarakan di Kota Semarang, setelahnya muncul Instruksi Presiden terkait dengan kedisiplinan protokol kesehatan. Hal ini merupakan langkah-langkah terpusat yang diturunkan ke daerah dalam bentuk peraturan kepada masyarakat mengenai informasi penanganan selama awal

pandemi covid-19 muncul. Informasi tersebut tidak hanya diturunkan pada pemerintah daerah saja melainkan instansi kenegaraan yang lain seperti TNI/POLRI dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease (Covid-19) dilaksanakan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hal-hal yang termuat dalam Inpres tersebut juga menganjurkan seluruh Gubernur, Walikota/Bupati untuk membuat peraturan-peraturan di daerahnya dalam bentuk Perda, Perwal/Perbup, ataupun Instruksi Gubernur, Instruksi Walikota/Bupati mengenai langkah-langkah pencegahan penyebaran covid-19. Peraturan pada tingkat daerah yang diinstruksikan oleh presiden memuat antara lain: kewajiban mematuhi protokol kesehatan yang memuat perlindungan terhadap individu masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan; peraturan pada tempat dan fasilitas umum di masing-masing daerah; peraturan pada para pelaku usaha yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam jumlah banyak; menetapkan sanksi dan hukuman pada para pelanggar peraturan; dan melaksanakan sosialisasi terkait upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 sebagai langkah dalam mendorong partisipasi masyarakat. Di dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 menyatakan implementasi-implementasi kebijakannya yang akan dilaksanakan oleh daerah

dan unsur-unsur kenegaraan lainnya dibebankan ke APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Hal ini merupakan arahan resmi dari pusat kepada daerah untuk segera menyusun dan melaksanakan kegiatan pencegahan penyebaran virus covid-19 dalam bentuk peraturan yang sah dan telah diundangkan. Jika perlu pemerintah pusat akan memberikan legalitas atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah serta dapat mengajukan bantuan biaya.

Koordinasi dalam menurunkan informasi dari pusat ke daerah atau sebaliknya, dijaga dan diawasi secara ketat serta melalui kajian keilmuan hingga akhirnya muncul peraturan. Sehingga proses penelaahan yang membutuhkan waktu ini, menciptakan kemunduran dalam penerapan kebijakan kepada masyarakat. Data dan analisis mengenai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 yang merupakan kasus kebencanaan non-alam baru, perlu dipelajari lebih mendalam. Penjagaan informasi mengenai validitas data dan peraturan dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan rancangan dan menetapkan kebijakan mengenai peraturan pencegahan penyebaran virus covid-19 melalui Peraturan Walikota dan Instruksi Walikota sebelum tanggal 4 Agustus 2020, ketika Inpres No.6 Tahun 2020 ditetapkan.

#### **4.2 Ekonomi Politik dalam Praktik Komunikasi Krisis saat Pandemi Covid-19 di Kota Semarang Tahun 2020**

Praktik komunikasi krisis selama pandemi covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang merupakan instruksi pusat, sehingga komunikasi

berjalan hierarkis dan lambat turun ke masyarakat. Keterlambatan penyampaian krisis dan upaya pencegahannya, melibatkan sisi ekonomi politik. Krisis kebencanaan yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi menurun di Kota Semarang berdampak pada kerugian, dan masyarakat di Kota Semarang cenderung lesu dalam upaya pemulihan ekonomi. Kebijakan PPKM sebagai strategi untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan tidak dikatakan sebagai bentuk ekonomi politik yang berhasil, sebab menurut Teori Deliarinov (2006) dan Jones (1993) politik mampu memiliki kekuatan untuk mengendalikan ekonomi. Kekuasaan yang merupakan politik, dilaksanakan oleh aktor-aktor politis yang memiliki andil besar dalam meningkatkan kembali laju pertumbuhan ekonomi.

Selain itu penyebaran informasi yang merupakan interpretasi dari praktik komunikasi krisis mengalami gelombang persoalan dan disinformasi. Penyesuaian implementasi PPKM berjalan tidak berimbang pada peraturan kehidupan di masyarakat, memicu ketidakadilan dalam pembiasaan normal baru (*new normal*). Masyarakat memahami, awal pandemi covid-19 di Kota Semarang bukan merupakan suatu isu kebencanaan yang serius, namun pada keberjalanannya memunculkan suatu dinamika sosial dan kecemasan saat kasus positif covid-19 mulai naik. Hal ini mengakibatkan munculnya pemikiran dalam perbaikan praktik komunikasi krisis yang buruk di Kota Semarang. Sementara itu pola kesesuaian data dan informasi yang semula bersifat instruksi, pada kenyataannya mengalami miss-koordinasi antara pusat dan daerah. Sehingga pada kasus pertanggung jawaban data perlu adanya upaya dalam meluruskan informasi

yang ada di dalam praktik buruk komunikasi krisis pandemi covid-19 di Kota Semarang.

#### **4.2.1 Keterlambatan Informasi sebagai Bentuk Inkapasitas Pemerintah**

Informasi pertama mengenai kasus positif covid-19 telah diumumkan oleh pemerintah pusat sejak tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu pemerintah pusat tidak langsung menginformasikan himbuan mengenai pencegahan penyebaran virus covid-19 kepada masyarakat, melainkan menenangkan dengan pernyataan bahwa pandemi covid-19 merupakan flu biasa yang tidak perlu dikhawatirkan. Sehingga saat itu, Pemerintah Kota Semarang juga tidak melakukan himbuan apapun terkait upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 melalui informasi secara *online* ataupun *offline* (langsung) kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, Pemerintah Kota Semarang melakukan himbuan kepada masyarakat terkait covid-19 yakni melalui akun media sosial milik pemerintah yaitu Instagram melalui gerakan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, dan Menjaga jarak). Setelahnya, informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat terkait covid-19 adalah rumah sakit rujukan covid-19 di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Informasi mengenai covid-19 diunggah tanggal 15 Maret 2020, hal ini merupakan keterlambatan setelah kasus positif pertama diumumkan di Indonesia.

Selain itu, informasi mengenai upaya pencegahan penyebaran covid-19 dilakukan hanya melalui media sosial, belum masif secara langsung dan melalui kanal online lain seperti website. Telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya website khusus informasi covid-19 dapat digunakan secara resmi pada Bulan Mei

2020. Keterlambatan kepada masyarakat mengenai informasi terkini seputar covid-19 di Kota Semarang merupakan bentuk pemerintah daerah yang melakukan penyesuaian secara hierarkis kepada pemerintah pusat. Kesesuaian dengan teori komunikasi krisis dalam pemerintahan daerah menurut Fishein dan Aizen (1975) mengemukakan bahwa masyarakat perlu memahami pengetahuan tentang kebencanaan sejak dini, sebab setiap individu mempertimbangkan informasi yang tersedia. Maka dengan Teori Fishein dan Aizen tersebut, Pemerintah Kota Semarang memiliki keterlambatan yang fatal sehingga akibatnya masyarakat telah memiliki perspektif tersendiri dalam menghadapi krisis kebencanaan covid-19.

Keterlambatan informasi sebagai bentuk praktik buruk komunikasi krisis Pemerintah Kota Semarang selama pandemi covid-19, membuktikan bahwa kewenangan pemerintah dalam menekan krisis kebencanaan tidak berjalan dengan baik. Antisipasi kebencanaan yang seharusnya telah dilakukan sejak dini, berimbas buruk terhadap pemahaman masyarakat. Pencegahan yang tidak dilakukan dengan segera sebagai upaya untuk tetap mempertahankan proses pembangunan di Kota Semarang. Pada Bab II telah disebutkan secara kronologis pada Bulan Desember 2019 Pemerintah Kota Semarang masih menerima kunjungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah pusat untuk mengoptimalkan Kota Semarang pada sisi pariwisata. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian investor dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Agenda Pemerintah Kota Semarang sendiri yakni kegiatan hiburan pada malam tahun baru 2020 dengan mengundang bintang tamu nasional pada tanggal 30

Desember 2020, serangkaian kegiatan hari ulang tahun Kota Semarang, pelaksanaan kegiatan Musrendang Kedungsepur pada tanggal 11 Maret 2020, program-program kegiatan sosialisasi Walikota ke sekolah-sekolah yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 2020 dan rencananya akan terus dilaksanakan sampai menjelang purna tugas Walikota menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020. Keseluruhan aktivitas yang masih tetap berjalan sampai dengan awal minggu kedua Bulan Maret 2020, merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Semarang belum melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Kegiatan pembangunan infrastruktur serta pariwisata masih dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang, yakni dengan alasan untuk merealisasikan penambahan anggaran dari pemerintah pusat. Pembangunan Pasar Johar, Semarang Zoo, serta perbaikan infrastruktur umum kota tetap dilaksanakan. Informasi mengenai covid-19 yang berjalan lambat, diikuti dengan pemerintah daerah yang masih mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dari sisi pembangunan dan kegiatan masyarakat belum diperketat, merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki praktik komunikasi yang buruk dan masih berorientasi pada instruksi pemerintah pusat. Kapasitas pemerintah daerah dalam otonomi informasi mengenai krisis kebencanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan inovasi-inovasi yang diciptakan tidak informatif dan menyeluruh.

#### **4.2.2 Ketidakpastian Informasi terkait Lockdown sebagai Refleksi Dilema Prioritas Kebijakan (antara Kesehatan dan Ekonomi)**

Penetapan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang merupakan pilihan untuk tidak menggunakan istilah Lockdown yang ditetapkan di kebanyakan daerah kabupaten./kota di Indonesia. Hal ini dipilih untuk menjadi dasar peraturan selama pandemi covid-19 di Kota Semarang dengan pertimbangan penjagaan laju ekonomi di tengah krisis kebencanaan. Akibatnya pemerintah dan masyarakat dipaksakan untuk tetap beraktivitas dan melakukan kegiatan ekonomi selama masa awal pandemi terjadi di Kota Semarang, sementara pengetahuan masyarakat akan kesehatan dan kepadatan ekonomi harus berjalan. Pengetahuan mengenai isu kebencanaan non alam pandemi covid-19 diperoleh masyarakat berdasarkan informasi mengenai pencegahan penyebaran virus yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya Pemerintah Kota Semarang memilih untuk menetapkan informasi melalui PPKM dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Pemerintah Kota Semarang memiliki kekhawatiran, bahwa pandemi covid-19 dapat menurunkan laju ekonomi secara signifikan. Sementara itu, tujuan Pemerintah dalam mempertahankan ekonomi memperoleh hasil nihil. Sebab pada akhir Tahun 2021, peneliti menemukan bukti bahwa Pemerintah Kota Semarang mengalami defisit APBD senilai 200 Miliar Rupiah. Ekonomi politik memiliki pengaruh dalam dilematis penetapan informasi melalui peraturan PPKM di Kota Semarang.

Ekonomi sebagai faktor dalam buruknya praktik komunikasi krisis di Kota Semarang selama pandemi covid-19 adalah dengan gagalnya pemerintah dalam



menjaga kestabilan ekonomi. Komunikasi krisis yang diciptakan selama pandemi covid-19 dengan menjaga sisi kesehatan dan ekonomi tidak memperoleh hasil memuaskan. Hal ini disebabkan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang selama kurun waktu satu tahun sejak kasus positif pertama diumumkan. Keterlambatan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan praktik komunikasi krisis membuat seluruh lapisan susunan kerja dibawahnya mengalami kemunduran dalam aksi-aksi pemulihan laju ekonomi secara signifikan dengan waktu yang cepat.

Dibuktikan dengan pernyataan Iswar dan Hendrar mengenai dampak ekonomi dari isu kesehatan memiliki pengaruh pada kekurangan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang:

“APBD kita saja masih terkoreksi pendapatannya defisit 200 Miliar. Kita mencoba juga dari APBD dan seluruh stakeholder untuk menutup semua kebutuhan masyarakat dari sisi logistik. Koreksi ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk kami selanjutnya.”<sup>93</sup>

Iswar menyatakan selain alasan keterlambatan pembayaran pajak dari pengusaha, APBD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang habis untuk menutup kebutuhan logistik masyarakat selama pandemi covid-19. Akibatnya anggaran utama dan anggaran cadangan milik Pemerintah Kota Semarang masih mengalami koreksi hingga defisit 200 Miliar Rupiah. Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi berjalan mundur dan cenderung statis.

Peneliti melakukan uji konsistensi terhadap penerapan praktik komunikasi krisis di Kota Semarang selama Tahun 2020 dengan melakukan wawancara

---

<sup>93</sup> Wawancara Iswar Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Semarang, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Semarang Gedung Balaikota Semarang Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, 28 Desember 2021.

tambahan kepada narasumber utama pada akhir Tahun 2021. Dinyatakan oleh Iswar Aminuddin bahwa kasus covid-19 berjalan secara dinamis, namun pada proses komunikasi krisis yang terjadi di dalam isu kebencanaan non alam ini, ekonomi yang coba dipertahankan dan di seimbangkan mengalami penurunan dan belum mengalami pemulihan pada angka normal sebelumnya:

“Akibat covid-19 Pendapatan Pemerintah Kota Semarang berkurang, artinya laju perkembangan covid-19 sudah menurun namun dampak ekonominya masih terasa. Orang yang mau nyetor pajak juga masih kurang tidak seperti dulu sebelum covid-19 masuk ke Kota Semarang, mungkin hal ini dipengaruhi juga mungkin untuk menutup kerugian mereka yang dulu.”<sup>94</sup>

Hasil dari wawancara tambahan ini, maka Pemerintah Kota Semarang belum dapat melakukan komunikasi krisis secara maksimal terhadap pembiasaan normal baru (New Normal) kepada masyarakat. Sebab masyarakat masih bersifat enggan dalam melakukan pembiasaan baru dan akibatnya laju ekonomi memperoleh dampak yang signifikan. Hal ini diakibatkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersifat inkonsistensi dengan penerapan buka-tutup. Informasi yang disampaikan pemerintah tidak seluruhnya terdistribusi kepada masyarakat secara komprehensif dan merata. Iswar menyatakan investor dan para pengusaha memilih sikap lambat dalam menutup kerugian yang di alami saat laju kasus positif covid-19 naik di Kota Semarang, sehingga pembayaran pajak sebagai sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga tidak terbayarkan secara maksimal dan tepat waktu. Pernyataan Iswar mengenai dampak ekonomi ini

---

<sup>94</sup> Wawancara Iswar Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Semarang, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Semarang Gedung Balaikota Semarang Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, 28 Desember 2021.

sesuai dengan sikap tegas yang dilakukan Hendrar saat pengetatan PPKM diberlakukan:

“Di peraturan Walikota kan sudah jelas, apabila melanggar maka diperingatkan. Sejak hari pertama PPKM darurat sampai kemarin kita muter terus. Langkah pertama apabila melanggar ya diperingatkan, misalnya melanggar lagi ya dilakukan penyitaan beberapa barang mereka atau kemudian apabila melanggar ketinggian yang lebih tinggi seperti apotek dan sejenisnya maka izin usaha mereka bisa kita cabut.”<sup>95</sup>

Hendrar melakukan praktik komunikasi krisisnya dengan menindak tegas pelanggar PPKM, khususnya bagi pelaku ekonomi yang masih beraktivitas diluar batas waktu yang ditentukan akan dicabut izin berusahanya. Hal tegas Hendrar dalam PPKM dilakukan saat kondisi darurat yakni saat kasus positif covid-19 naik, sementara saat turun Ia mengizinkan, dengan melonggarkan batas waktu kegiatan perekonomian di Kota Semarang. Penamaan peraturan yang konsisten namun pelaksanaannya yang berjalan inkonsisten, membuat masyarakat bingung dalam menentukan arah dalam menghadapi isu kesehatan pandemi covid-19.

Dampak ekonomi yang berjalan tidak sesuai dengan rencana melalui PPKM masih diimbangi oleh Hendrar dengan usaha peningkatan upaya pemulihan kesehatan melalui vaksinasi yang diberikan secara konsisten:

“Progress pemberian V1 di Kota Semarang sudah mencapai 512.000 per hari ini. V2 290 ribuan. Yang sudah V1 angkanya mencapai 40 persen. Keterlambatan ini dikarenakan ketersediaan vaksin yang kurang dan ada beberapa tempat pemberian (sentra) vaksin yang tidak berani banyak-banyak menampung calon penerima vaksin karena menghindari kerumunan(bergerombol).”<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara Hendrar Prihadi , Walikota Semarang, virtual zoom, 12 Juli 2021.

<sup>96</sup> Wawancara Hendrar Prihadi , Walikota Semarang, virtual zoom, 12 Juli 2021.

Isu kesehatan mengenai keterlambatan dan ketidakmerataan pemberian vaksin di Kota Semarang dinyatakan Hendrar sebagai bentuk pencegahan kerumunan, sehingga ketersediaan vaksin dilakukan secara cukup dan bersifat berkala di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kota Semarang.

Sehingga isu kesehatan dan upaya pengurangan dampak ekonomi di Kota Semarang selama pandemi covid-19 pada Tahun 2020 merupakan akibat dari fase komunikasi krisis yang berjalan tidak optimal. Masyarakat belum dapat membiasakan normal baru (*new normal*) di Kota Semarang dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pemerintah Kota Semarang masih memiliki tanggung jawab dalam penjagaan laju kesehatan selama pandemi covid-19 dan stabilitas ekonomi.

#### **4.2.3 Upaya Memperbaiki Praktik Komunikasi Krisis di Gelombang**

##### **Pandemi Berikutnya**

Komunikasi krisis yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi covid-19, dilakukan dengan pembatasan kegiatan saat kasus positif naik dan pelonggaran saat kasus positif mulai menurun. Hal yang dibatasi salah satunya yakni penutupan sejumlah gerbang masuk ke dalam kota dan pelarangan bagi masyarakat Kota Semarang yang ingin berpergian ke luar kota, informasi mengenai peraturan ini disebarluaskan menjelang libur lebaran Tahun 2020. Informasi tersebut disampaikan oleh pemerintah setelah diizinkan Kapal MV Columbus masuk ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada saat awal kasus covid-19 mulai menyebar. Informasi yang tidak adil dan berimbang mengenai upaya pencegahan juga dilakukan pasca libur Lebaran

Tahun 2020, bahwa ada libur atau cuti pengganti lebaran pada akhir bulan Oktober 2020. Masyarakat diberikan informasi yang tidak merata mengenai upaya-upaya dalam melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Semarang, merupakan wujud kepentingan ekonomi di dalam pengambilan keputusan.

Bukti informasi yang tidak berimbang oleh pemerintah dalam mempertahankan kedua isu antara kesehatan dan ekonomi yakni dengan pelanggaran yang diberlakukan. Terutama pada saat libur lebaran Tahun 2020, sebelum kasus positif covid-19 pertama kali naik pada Bulan Juli-Agustus Tahun 2020 swalayan dan pusat perbelanjaan lainnya masih dibuka. Pernyataan dari pewarta dan Direktur Pattiro Semarang berdasar dari hasil wawancara peneliti, mengungkapkan bahwa pembatasan untuk warga di luar Kota Semarang diperketat namun warga Kota Semarang sendiri diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas jual-beli dan kegiatan perekonomian lainnya. Hal ini dibuktikan dengan masih beraktivitasnya masyarakat di luar rumah saat dan menjelang Lebaran Tahun 2020, bahkan tidak sedikit di antaranya yang masih membeli peralatan dan keperluan hari raya di pasar tradisional, swalayan, dan pusat perbelanjaan sejenis. Kegiatan perkantoran dan aktivitas sosial masih dilakukan secara normal, hanya menerapkan 3M yang pada saat itu penjagaannya juga masih longgar disebabkan pengetahuan tim pencegahan dan masyarakat yang masih dangkal terkait dengan upaya pencegahan penyebaran covid-19. Pada saat itu pemasukan daerah melalui PAD masih dikatakan stabil dan masih dalam skala baik.

Pemerintah dan masyarakat masih dengan pola pembiasaan kehidupan seperti biasa selayaknya pandemi covid-19 belum masuk di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan masih diberikannya izin berlibur tanggal merah saat akhir bulan Oktober Tahun 2020 sebagai pengganti Libur Lebaran Tahun 2020. Walaupun pada saat Libur Lebaran Tahun 2020 terdapat pembatasan di pintu masuk dan keluar batas kota, setelahnya tetap diberlakukan cuti lebaran pengganti. Pemerintah Kota Semarang melalui PPKM masih optimis dengan menyeimbangkan isu kesehatan dan ekonomi, sebab kekhawatiran turunnya laju pertumbuhan ekonomi serta janji politik proyek pembangunan daerah masih tetap berjalan.

Selain itu, bukti ketidakberimbangan informasi selama praktik komunikasi krisis pandemi covid-19 di Kota Semarang yakni dengan masuknya Kapal MV Columbus yang memperoleh izin berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang serta melakukan kegiatan *tour* pariwisata di lingkungan Kota Semarang. Di dalamnya terdapat penumpang yang merupakan warga negara asing terindikasi positif covid-19. Keterangan di atas merupakan hasil pernyataan Edhie Prayitno Ige dalam wawancaranya dengan peneliti, yang jelas menerangkan bahwa sebelumnya kapal tersebut telah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan telah tertular seorang anak buah kapal yang merupakan Warga Negara Indonesia. Komunikasi krisis saat pra krisis bersifat longgar dan banyak celah-celah kemungkinan tingginya virus covid-19 masuk ke dalam Kota Semarang. Agus Sutiyono, wartawan Kompas TV Jawa Tengah yang menyatakan kelonggaran peraturan tersebut saat tahap pra krisis.

Izin masuknya Kapal Pesiar MV Colombus ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang merupakan persetujuan berjenjang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kota Semarang. Kepentingan ekonomi dengan membayar senilai 750 Juta Rupiah, Kapal Pesiar MV Clombus mampu memperoleh akses untuk dapat masuk dan melakukan kegiatan *tour* pariwisata. Hal ini membuktikan bahwa dengan membeli kekuasaan maka segala urusan kepentingan dapat berjalan, bahkan ketika isu kesehatan sedang mengalami masa awal krisis yang dapat mengancam kehidupan suatu daerah kedepannya:

“*Terus* kontak ini rencana mau kemana mas? “*Ee... Semarang*” Emang udah diizinkan? “Udah kita diizinkan dan ada jaminan--” jadi dia tuh bawa jaminan 750 juta ke-- Iya, ke Kominfo provinsi, tapi kan aku gak ngungkap itu, udah biar aja, nanti anak-anak tau sendiri.....”<sup>97</sup>

Transaksi ekonomi antara pihak swasta dan pemerintah merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Edhie Prayitno Ige melalui penelitian yang akan Ia tulis sebagai berita. Informasi mengenai izin masuknya Kapal Pesiar MV Colombus juga dibenarkan oleh pihak pemerintah, hal ini disebabkan saat itu kasus positif covid-19 belum tinggi. Ditambah dengan penumpang ber warga negara asing yang positif covid-19 belum dinyatakan keabsahannya. Namun di sisi lain berdasar data dari tenaga kesehatan pasien positif covid-19 pertama di Kota Semarang dinyatakan bahwa keterlularan pasien positif salah satu penyebabnya yakni, dengan datangnya Kapal Pesiar MV Colombus yang melakukan *tour* wisata di Kota Semarang.

---

<sup>97</sup> Wawancara wartawan *Liputan 6.com* kontributor Jawa Tengah Edhie Prayitno Ige, di Kediaman Edhie Prayitno Ige, 9 Mei 2021.

Sejak awal pandemi covid-19 masuk ke Kota Semarang, informasi yang disampaikan oleh pemerintah memiliki dualisme interpretasi. Akibatnya masyarakat mengalami kebingungan dalam menangkap pola komunikasi yang diciptakan untuk mencegah penyebaran kasus positif covid-19. Walaupun setiap tujuan yang dicapai memiliki kepentingan di dalamnya, namun upaya memperbaiki praktik komunikasi krisis perlu dilakukan. Salah satunya yakni dengan menerapkan teori komunikasi yang dikemukakan oleh Reynolds dan Seeger mengenai tahap kesesuaian komunikasi krisis yang ideal yakni: 1) Mempersiapkan Fase Pra Krisis dengan penyusunan kebijakan yang tepat dan terukur; 2) Menghadapi Fase Awal Krisis dengan strategi implementasi kebijakan secara bertahap dan dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat; 3) Melaksanakan Fase Krisis kebencanaan dengan praktik komunikasi dan penyebarluasan informasi secara menyeluruh dan berimbang; 4) Merefleksikan isu kebencanaan pada Fase Resolusi dan Evaluasi melalui kegiatan monitoring dan turun ke masyarakat agar solusi terhadap penanganan kebencanaan dapat dikomunikasikan secara terarah dan tepat sasaran. Keempat hal ini merupakan fondasi dalam penanganan isu kebencanaan melalui komunikasi dan informasi secara *online* ataupun *offline* yang dapat membantu menyeimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan saat krisis kebencanaan di daerah dapat dicegah melalui komunikasi yakni dengan antisipasi dini melalui edukasi dan penyesuaian terhadap data terkini di daerah, nasional, maupun internasional. Sejak akhir Tahun 2019, dunia internasional telah mendeklarasikan akan virus covid-19



yang akan menjadi pandemi, hal ini seharusnya dapat dijadikan perhatian bagi seluruh daerah di Indonesia untuk bersiap siaga. Sehingga tidak menjadi alasan, kurangnya pengetahuan terkait pencegahan virus covid-19 di Kota Semarang disebabkan oleh keterlambatan informasi dari pusat ataupun dunia internasional. Keseluruhan upaya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menjaga kejiwaan seluruh masyarakat, karena krisis kebencanaan bukan perubahan tatanan sosial yang mudah. Pembiasaan normal baru (*new normal*) tidak dapat mengubah kebiasaan seluruh masyarakat, pola kehidupan tidak seperti waktu sebelumnya dengan atribut medis serta protokol kesehatan.

Informasi yang tidak berimbang mengenai upaya pencegahan yang dilakukan pada masa awal pandemi covid-19 di Kota Semarang, seharusnya mampu menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki kesesuaian tahap praktik komunikasi krisis kelak di kemudian hari. Masyarakat selaku konsumen informasi perlu dilibatkan dalam mewujudkan pola pembiasaan normal baru (*new normal*) melalui komunikasi yang ideal. Kepentingan dan kekuasaan bukan merupakan prioritas di tengah krisis kebencanaan yang berjalan fluktuatif serta dinamis, terutama di daerah yang memiliki hak otonomi. Pemerintah Kota Semarang dapat merealisasikan haknya dengan inovasi melalui kegiatan-kegiatan pencegahan penyebaran covid-19 lebih dini, sebelum nantinya kasus covid-19 muncul dengan varian yang lebih variatif dan mengancam keseimbangan tatanan kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang di waktu yang akan datang.

#### **4.2.4 Komunikasi Asertif: Upaya Meluruskan Disinformasi terkait Pandemi di Tahapan Lebih Lanjut**

Informasi terkait data jumlah kasus positif menurut Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Satgas Covid-19 pusat sempat mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Tercatat oleh Satgas Covid-19 pusat bahwa kasus positif di Kota Semarang sebanyak 2.591, sementara dalam data yang dicantumkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui [siagacorona.semarangkota.go.id](http://siagacorona.semarangkota.go.id) kasus positif sebanyak 507. Perbedaan data ini, juga disampaikan oleh wartawan *Kompas TV Jawa Tengah* Agus Sutyono ketika mengirimkan berita ke nasional, Ia sempat melakukan klarifikasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Agus Sutyono mendapatkan jawaban bahwa data mengalami kekeliruan, hingga akhirnya data nasional disesuaikan dengan data di daerah:

“Aku ga melihat Mbak cuma yang sering terjadi adalah perbedaan data...pasien Covid, sering terjadi, coba cek... Maksudnya data pasien Covid Jawa Tengah dengan data nasional....seringkali berbeda itu seringkali... Ga ngerti itu data nasional dari mana, kok nyebutnya sekian kaya gitu...ini diprotes oleh pimpinan daerah, kalau ga salah 2 atau 3 kali..”<sup>98</sup>

Ralat data yang dilakukan oleh Agus Sutyono dan tim redaksi di daerah diterima baik oleh pimpinan daerah di Jawa Tengah dan Kota Semarang. Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah melakukan koordinasi ulang kepada Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengenai klarifikasi data pasien covid-19 pada Bulan September Tahun 2020. Keterangan ini disampaikan oleh Agus Sutyono kepada

---

<sup>98</sup> Wawancara wartawan *Kompas TV Jawa Tengah* Agus Sutyono, di Gedung Kompas Jl. Menteri Supeno No. 28-30 Semarang, 7 Mei 2021.

peneliti saat wawancara. Hendrar tidak langsung melakukan klarifikasi data, melainkan meneruskan informasi tersebut ke pejabat satuan kerja di bawahnya yakni Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sesuai pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang saat diminta data klarifikasi oleh Hendrar, bahwa terdapat data pada laman web [siagacorona.semarangkota.go.id](http://siagacorona.semarangkota.go.id) yang sempat mengalami verifikasi ulang data, dan data nasional sudah diperbaiki sesuai dengan data dari daerah. Namun dari verifikasi ulang tersebut, terdapat data yang belum diperbaiki secara menyeluruh yakni ada data yang terselip.

Klarifikasi informasi yang dilakukan oleh Hendrar kepada satuan kerja di bawahnya mengenai kekeliruan data kasus positif covid-19 pada Bulan September Tahun 2020 dinyatakan oleh Sekretaris Daerah sebagai wujud *miss-communication* antara daerah dan pusat, hal ini disampaikan ketika wawancara dengan peneliti:

“.....data verifikasi ulang mengenai pasien positif di Bulan September itu merupakan bentuk kekeliruan data yang setelahnya langsung kita sampaikan ke pusat dan kementerian..bukan menjadi masalah yang amat serius sebab hari itu juga kami langsung konfirmasi, dan langsung sesuaikan dengan data di web...”<sup>99</sup>

Komunikasi yang disampaikan dari daerah ke pusat yang sempat mengalami distraksi informasi, dinyatakan oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagai suatu masalah sederhana yang dapat diantisipasi dalam hitungan waktu yang singkat. Ketika data sudah di klarifikasi, maka tanggapan masyarakat akan

---

<sup>99</sup> Wawancara Iswar Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Semarang, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Semarang Gedung Balaikota Semarang Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, 28 Desember 2021.

langsung tergiring pada informasi yang baru diperbaiki. Namun dalam kondisi tertentu, tidak seluruh masyarakat memahami dan mengawasi informasi terkait berita yang baru saja diperbaharui dengan alasan salah data. Masyarakat adalah konsumen berita yang langsung menangkap informasi aktual dan isu populer yang sedang hangat diperbincangkan. Sehingga informasi mengenai memuncaknya kasus positif covid-19 di Kota Semarang yang sangat drastis disebabkan oleh kekeliruan data mampu merubah sudut pandang masyarakat dan pada saat itu, Kota Semarang termasuk dalam kawasan zona merah. Hal ini yang akan berdampak pada kondisi keseimbangan sosial daerah, salah satunya yang paling dominan adalah ekonomi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka memperbaiki disinformasi dengan pemerintah pusat selain melakukan verifikasi data yakni dengan memperbaiki sistem informasi. Yakni memperkaya fitur pada website [siagacorona.semarangkota.go.id](http://siagacorona.semarangkota.go.id) dengan penambahan peta microzonasi dan pembaharuan data vaksin. Setelah sebelumnya hanya ada fitur grafik kasus positif, sembuh, meninggal, suspek, dan probable. Peta sebaran data covid-19 melalui update data microzonasi digunakan untuk mengetahui secara pasti lokasi-lokasi di seluruh wilayah Kota Semarang dengan kasus positif covid-19 terbanyak atau minim. Sehingga Pemerintah Kota Semarang dapat memetakan dan menginformasikan kepada masyarakat terkait pemutakhiran data sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan data kasus positif covid-19. Sementara itu upaya pengurangan jumlah pasien positif yang dilakukan pada akhir Tahun 2020 melalui vaksin, dilakukan pendataan awal yang diperbaharui melalui fitur data vaksin.

Selain kedua fitur tambahan pada website [siagacorona.semarangkota.go.id](http://siagacorona.semarangkota.go.id), ditambahkan update data keluar-masuk masyarakat ke Kota Semarang melalui form serta data pendatang mudik.

Pada awal terbentuknya website [siagacorona.semarangkota.go.id](http://siagacorona.semarangkota.go.id) upaya tracking pendataan kasus positif covid-19 tersedia secara minimalis dan terbatas, hal ini disebabkan integrasi informasi dengan tim satuan gugus tugas di Kota Semarang dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilakukan secara dini dan dengan keterbatasan pengetahuan. Sekretaris Daerah Kota Semarang dalam pernyataannya menjelaskan selain dari website [semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id), Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan upaya pembaharuan data melalui kanal media sosial dan website miliknya setiap minggu diiringi dengan sosialisasi online mengenai informasi tips kesehatan dalam upaya pencegahan kasus positif covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan data informasi ke masyarakat, terutama informasi yang disampaikan ke pusat agar tidak terjadi kekeliruan. Dengan adanya data yang dapat di lihat secara aktual dan berkala melalui website [siagacorona.semarangkota.go.id](http://siagacorona.semarangkota.go.id), pemerintah pusat dan masyarakat dapat membandingkan serta memastikan data kasus positif covid-19 di Kota Semarang melalui instagram, twitter, dan website Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selain itu, untuk melakukan fiksasi data secara *hotline* dapat dilakukan melalui telepon darurat 112 dan aplikasi *whatsapp* Lapor Hendi.

Kanal yang tersedia secara online oleh Pemerintah Kota Semarang, dirintis dan disosialisasikan ke masyarakat setelah kasus positif covid-19 mulai muncul dan naik. Realitas penggunaan data secara *online* kepada masyarakat merupakan

keterlambatan, sebab kasus positif dan kasus meninggal telah ada sebelumnya. Upaya secara langsung (*offline*) yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pemutakhiran data covid-19 tidak dilakukan secara serius dan menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat Kota Semarang yang tidak mengetahui berapa jumlah kasus positif covid-19 disekitar tempat tinggalnya, akibatnya banyak dari masyarakat yang tetap melakukan aktivitas tanpa menggunakan masker serta tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kondisi ini mengakibatkan timbul informasi yang tidak pasti serta berpotensi terjadinya kekeliruan terhadap data kasus positif covid-19.

Kesalahan dalam kekeliruan penyebarluasan informasi langsung berdampak pada stabilitas ekonomi di daerah, sebab keluar-masuknya investor bergantung pada kondisi baik tidaknya suatu daerah. Isu negatif kondisi suatu daerah disebabkan oleh krisis kebencanaan memiliki dampak besar, yakni kepercayaan dalam menanamkan modal dan berjual beli yang turun. Kondisi inilah yang menjadikan Kota Semarang mengalami penurunan laju ekonomi pada awal isu pandemi covid-19.

Penjagaan terhadap penyebarluasan informasi merupakan bagian dari praktik komunikasi krisis yang seharusnya mampu diciptakan sejak awal. Komunikasi internal antar satuan kerja perangkat daerah terhadap kepala daerah diselaraskan seiring dengan semakin bertumbuhnya krisis kebencanaan. Informasi kepada masyarakat diselenggarakan secara terbuka, namun tetap diawasi dan dikoordinasi. Sebab apabila komunikasi yang buruk terus tercipta di tengah krisis

kebencanaan tidak segera diperbaiki, maka dampaknya akan semakin parah dan kerugian yang dialami akan lebih besar.

Sementara itu persoalan disinformasi antara pusat dan daerah, Pemerintah Kota Semarang berhadapan dengan pemerintah pusat terkait kepastian terhadap pembaharuan data kasus positif covid-19, melakukan upaya klarifikasi sesuai dengan data yang tersedia pada laman website [siagacorona.semarangkota.go.id](http://siagacorona.semarangkota.go.id). Penambahan fitur yang tersedia di dalam laman website serta media sosial milik Dinas Kesehatan merupakan pengkayaan data yang digunakan untuk membandingkan kesesuaian data covid-19 yang dapat digunakan kelak di kemudian hari. Namun sampai hari ini upaya langsung dari Pemerintah Kota Semarang untuk turun ke masyarakat terkait sosialisasi data kasus positif covid-19 belum berjalan secara masif, perlu adanya evaluasi pemutakhiran data supaya masyarakat paham akan jumlah sebaran kasus positif covid-19 sebagai bahan refleksi pencegahan dini isu kebencanaan yang akan datang.